

Nomor : B/ 1157 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di

Kandangan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap penjenjangan kinerja di level Pemerintah Daerah (pemda) dan Perangkat Daerah (PD);
- b. Telah melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja untuk mengkolaborasikan beberapa PD untuk mencapai kinerja organisasi;
- c. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sudah dilaksanakan secara elektronik dan berkala serta menampilkan beberapa fitur berupa hasil analisis yang dapat mendorong PD untuk melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap masalah utama.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,50** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"memuaskan"**, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,16
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,34
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, namun upaya yang dimaksud belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai kondisi yang diinginkan, misalnya dalam hal penyempurnaan penjenjangan kinerja pada seluruh PD;
- Upaya efisiensi melalui *refocusing* program kegiatan telah dilakukan, namun masih perlu dimaksimalkan dengan fokus dalam hal penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah memanfaatkan aplikasi kinerja yang diberi nama e-sakip Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum terdapat pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja serta dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level PD belum dilengkapi dengan definisi operasional, sebagai contoh ditemukan pada Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja yang dilakukan menggunakan aplikasi e-sakip belum cukup optimal untuk melihat keterkaitan antara program dan kegiatan dengan kinerja organisasi;

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
- Laporan kinerja/LPPD Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum disampaikan secara tepat waktu pada *esr.menpan.go.id* serta belum dipublikasi pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi melalui Peraturan Bupati No 36 tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih dilakukan secara manual dan laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di OPD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja pada seluruh PD dengan memperhatikan kerangka berpikir logis dalam mencapai kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan yang lain;
- 2) Melakukan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka *refocusing* program/kegiatan;

- 3) Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e-sakip dengan memasukkan rencana aksi sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi seluruh PD dalam pengukuran kinerja. Serta menyusun pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- 4) Meningkatkan kualitas laporan kinerja/LPPD dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyempurnakan atau meningkatkan kinerja kedepannya. Selain itu, perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh PD untuk menyampaikan dokumen Laporan Kinerja/LPPD secara tepat waktu dan dipublikasikan pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- 5) Mendorong APIP/Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD. Selain itu, menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* kepada PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Bupati Hulu Sungai Selatan.